

SOSIALISASI JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI ISTRI NELAYAN POLE AND LINE SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KETAHANAN SOSIAL RUMAH TANGGA NELAYAN DI DESA BUGIS KECAMATAN SAPE, KABUPATEN BIMA

Lalu Hizbulloh^{1*}, Sab'ul Masani¹, Mohammad Alwi Shahab¹, Ade Rezkika Nasution¹, Yuliana Asri², Zaenal Abidin²

¹Program Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Mataram

²Program Studi Studi Budidaya Perairan Fakultas Pertanian Universitas Mataram

Alamat korespondensi : Lalu.hizbulloh@staff.unram.ac.id

Artikel history :	Received	: 10 Mei 2026	DOI : https://doi.org/10.29303/pepadu.v7i2.11017
	Revised	: 25 Juni 2026	
	Published	: 30 Juni 2026	

ABSTRAK

Profesi nelayan merupakan salah satu pekerjaan dengan tingkat risiko kecelakaan kerja dan kematian tertinggi di dunia. Kondisi cuaca yang tidak menentu, gelombang tinggi, penggunaan alat tangkap, serta aktivitas fisik yang berat menyebabkan nelayan rentan mengalami kecelakaan yang dapat berujung pada cacat permanen maupun kematian. Namun demikian, sebagian besar nelayan skala kecil di Indonesia masih bekerja pada sektor informal tanpa perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sehingga keluarga nelayan menghadapi kerentanan ekonomi apabila pencari nafkah utama mengalami kecelakaan kerja. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman istri nelayan mengenai risiko pekerjaan suami sebagai nelayan pole and line sekaligus memperkenalkan program BPJS Ketenagakerjaan kategori Bukan Penerima Upah (BPU) sebagai alternatif perlindungan sosial yang terjangkau dan mudah diakses. Kegiatan dilaksanakan di Desa Bugis, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima melalui metode diskusi partisipatif dan sosialisasi interaktif yang melibatkan istri nelayan pole and line. Tahapan kegiatan meliputi identifikasi persepsi peserta mengenai risiko pekerjaan nelayan, penyampaian materi mengenai manfaat program BPJS Ketenagakerjaan, serta sesi diskusi dan tanya jawab. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebagian besar peserta telah memiliki persepsi yang baik mengenai tingginya risiko pekerjaan nelayan, terutama risiko tenggelam, kecelakaan saat memancing, cuaca buruk, serta kehilangan sumber pendapatan apabila suami mengalami kecelakaan. Namun demikian, pengetahuan mengenai mekanisme perlindungan sosial masih relatif rendah. Setelah kegiatan sosialisasi, peserta menunjukkan peningkatan pemahaman mengenai manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), besaran iuran, serta prosedur kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan BPU. Kegiatan ini menunjukkan bahwa pemberdayaan istri nelayan merupakan strategi yang efektif dalam meningkatkan kesadaran keluarga nelayan terhadap pentingnya perlindungan sosial dan ketahanan ekonomi rumah tangga.

Kata kunci: BPJS Ketenagakerjaan, istri nelayan, jaminan sosial, perlindungan sosial, nelayan pole and line,.

ABSTRACT

Fishing is widely recognized as one of the occupations with the highest rates of work-related accidents and fatalities worldwide. Unpredictable weather conditions, high waves, the use of fishing gear, and physically demanding work expose fishers to occupational hazards that may result in permanent disability or death. Nevertheless, most small-scale fishers in Indonesia continue to work in the informal sector without adequate employment social security coverage, leaving fishing households economically vulnerable when the primary income earner experiences a work-related accident. This community engagement program aimed to enhance the understanding of fishers' wives regarding the occupational risks faced by their husbands working in the pole-and-line fishery, while introducing the BPJS Ketenagakerjaan Informal Worker (Bukan Penerima Upah; BPU) scheme as an affordable and accessible social protection option. The program was conducted in Bugis Village, Sape District, Bima Regency, through participatory discussions and interactive socialization sessions involving the wives of pole-and-line fishers. The activities included identifying participants' perceptions of occupational risks in fisheries, delivering educational materials on the benefits of the BPJS Ketenagakerjaan program, and facilitating interactive discussions and question-and-answer sessions. The findings revealed that most participants had a good understanding of the high occupational risks faced by fishers, particularly drowning, fishing-related accidents, adverse weather conditions, and the potential loss of household income resulting from work-related injuries. However, their knowledge of available social protection mechanisms remained relatively limited. Following the socialization program, participants demonstrated improved understanding of the benefits of the Employment Injury Insurance (Jaminan Kecelakaan Kerja; JKK), Death Benefit Insurance (Jaminan Kematian; JKM), contribution schemes, and the registration procedures for the BPJS Ketenagakerjaan BPU program. These findings suggest that empowering fishers' wives is an effective strategy for strengthening household awareness of social protection and enhancing the economic resilience of fishing families.

Keywords: BPJS Ketenagakerjaan, fishers' wives, pole-and-line fishers, social security, social protection.

PENDAHULUAN

Sektor perikanan tangkap merupakan salah satu sektor strategis yang berperan penting dalam penyediaan pangan, penciptaan lapangan kerja, serta pembangunan ekonomi masyarakat pesisir di berbagai negara (FAO, 2024). Secara global, lebih dari 61 juta orang bekerja pada sektor perikanan tangkap dan budidaya, dengan sebagian besar merupakan nelayan skala kecil yang menggantungkan penghidupannya pada sumber daya perikanan (FAO, 2024). Meskipun demikian, sektor perikanan masih dikategorikan sebagai salah satu pekerjaan dengan tingkat risiko kecelakaan dan kematian tertinggi di dunia karena pekerja menghadapi cuaca ekstrem, kondisi laut yang dinamis, penggunaan alat tangkap, beban kerja fisik yang tinggi, serta keterbatasan akses terhadap pelayanan kesehatan dan sistem perlindungan sosial (ILO, 2007; ILO, 2025).

Di Indonesia, sebagian besar nelayan masih bekerja pada sektor informal sehingga belum memperoleh perlindungan ketenagakerjaan secara optimal (ILO, 2025). Hubungan kerja yang bersifat informal menyebabkan banyak nelayan bekerja tanpa kontrak kerja tertulis maupun jaminan sosial yang memadai (ILO, 2025). Padahal, karakteristik pekerjaan nelayan memiliki tingkat risiko yang jauh lebih tinggi dibandingkan sebagian besar pekerjaan di darat (FAO, 2024). Berbagai kecelakaan seperti terjatuh ke laut, terpeleset di geladak kapal, tertusuk mata pancing, tertimpa peralatan, kebakaran di ruang mesin, hingga tenggelam masih menjadi penyebab utama cedera dan kematian pada awak kapal perikanan di berbagai negara (ILO,

2007; FAO, 2024). Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penguatan sistem perlindungan sosial bagi pekerja sektor perikanan, khususnya nelayan skala kecil (ILO, 2024).

Nelayan *pole and line* merupakan salah satu kelompok nelayan yang memiliki karakteristik pekerjaan dengan intensitas fisik yang tinggi. Metode penangkapan dilakukan secara manual menggunakan joran (*pole*) tanpa bantuan alat penarik mekanis sehingga membutuhkan tenaga manusia secara terus-menerus selama proses penangkapan berlangsung (International Pole & Line Foundation, 2023). Selama operasi penangkapan, awak kapal bekerja pada geladak yang basah dan licin, menghadapi gelombang laut yang berubah-ubah, serta melakukan aktivitas berulang dengan kecepatan tinggi ketika ikan sedang makan (*feeding frenzy*) (International Pole & Line Foundation, 2023). Selain kegiatan penangkapan, nelayan juga melakukan pemuatan logistik, pengisian umpan hidup, pelayaran menuju *fishing ground*, pengoperasian mesin, serta pembongkaran hasil tangkapan yang masing-masing memiliki potensi bahaya terhadap keselamatan dan kesehatan kerja (ILO, 2025). Kombinasi berbagai aktivitas tersebut meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan kerja maupun gangguan kesehatan akibat pekerjaan (FAO, 2024).

Risiko pekerjaan nelayan tidak hanya berdampak pada individu yang bekerja di laut, tetapi juga memberikan konsekuensi sosial dan ekonomi yang besar terhadap keluarga yang ditinggalkan (ILO, 2024). Ketika seorang nelayan mengalami kecelakaan berat, cacat permanen, atau meninggal dunia, rumah tangga kehilangan sumber pendapatan utama sehingga meningkatkan kerentanan ekonomi keluarga (FAO, 2024). Kondisi tersebut sering kali menyebabkan keluarga mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, membiayai pendidikan anak, serta meningkatkan risiko kemiskinan antargenerasi (ILO, 2024).

Oleh karena itu, perlindungan sosial tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi pekerja, tetapi juga sebagai mekanisme untuk memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga dalam menghadapi berbagai risiko kehidupan (ILO, 2024; Amartya Sen, 1999). Dalam rumah tangga nelayan, istri memiliki peran penting dalam mengelola keuangan keluarga, memenuhi kebutuhan rumah tangga, serta mengambil keputusan ekonomi ketika suami sedang melaut atau mengalami gangguan pekerjaan (FAO, 2024). Perempuan juga berkontribusi dalam meningkatkan ketahanan rumah tangga melalui pengelolaan pendapatan, tabungan, dan strategi adaptasi terhadap ketidakpastian ekonomi (FAO, 2024). Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa literasi masyarakat pesisir mengenai perlindungan sosial masih relatif rendah sehingga kepesertaan nelayan sektor informal dalam program jaminan sosial masih terbatas (ILO, 2025). Rendahnya pemahaman mengenai manfaat program, mekanisme kepesertaan, besaran iuran, serta prosedur klaim menjadi salah satu penyebab rendahnya pemanfaatan program perlindungan sosial oleh pekerja sektor informal (ILO, 2025).

Pemerintah Indonesia melalui BPJS Ketenagakerjaan telah menyediakan skema perlindungan bagi pekerja informal melalui program **Bukan Penerima Upah (BPU)** (BPJS Ketenagakerjaan, 2024). Program tersebut memberikan perlindungan berupa **Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)** dan **Jaminan Kematian (JKM)** dengan besaran iuran yang relatif terjangkau sehingga dapat diakses oleh nelayan skala kecil (BPJS Ketenagakerjaan, 2024). Kepesertaan dalam program tersebut berpotensi mengurangi dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh kecelakaan kerja maupun kematian pencari nafkah utama sehingga mampu meningkatkan resiliensi rumah tangga nelayan (ILO, 2024).

Berdasarkan hasil diskusi selama pelaksanaan kegiatan pengabdian di Desa Karumbu, Kecamatan Sape, diketahui bahwa sebagian besar keluarga nelayan telah menyadari tingginya risiko pekerjaan di laut. Namun demikian, pemahaman mengenai bentuk perlindungan sosial yang tersedia bagi pekerja sektor informal masih terbatas. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara persepsi terhadap risiko pekerjaan dan pemanfaatan instrumen perlindungan sosial. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan sosialisasi yang mampu meningkatkan

pengetahuan keluarga nelayan mengenai manfaat dan mekanisme kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebagai salah satu strategi mitigasi risiko sosial dan ekonomi.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk **(1)** meningkatkan pemahaman istri nelayan mengenai risiko pekerjaan yang dihadapi suami sebagai nelayan *pole and line*, **(2)** meningkatkan pengetahuan peserta mengenai manfaat program BPJS Ketenagakerjaan kategori Bukan Penerima Upah (BPU), serta **(3)** mendorong tumbuhnya kesadaran keluarga nelayan terhadap pentingnya perlindungan sosial sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga nelayan.

METODE KEGIATAN

2.1 Lokasi dan Waktu Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2026 di **Desa Bugis, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat**. Desa Bugis merupakan salah satu sentra perikanan tuna *pole and line* di Kabupaten Bima yang sebagian besar masyarakatnya menggantungkan mata pencaharian pada sektor perikanan tangkap. Karakteristik pekerjaan nelayan di wilayah ini memiliki tingkat risiko yang tinggi karena aktivitas penangkapan dilakukan di laut lepas dengan durasi melaut beberapa hari hingga lebih dari satu minggu.

Pemilihan lokasi didasarkan pada tingginya ketergantungan masyarakat terhadap sektor perikanan tangkap serta masih terbatasnya pemanfaatan program jaminan sosial ketenagakerjaan oleh nelayan sektor informal.

2.2 Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan adalah **istri nelayan pole and line** yang suaminya masih aktif bekerja sebagai awak kapal maupun nakhoda kapal *pole and line* di Desa Karumbu. Pemilihan istri nelayan sebagai sasaran didasarkan pada perannya yang strategis dalam pengelolaan keuangan rumah tangga dan pengambilan keputusan terkait perlindungan sosial keluarga. Peningkatan pemahaman istri mengenai manfaat jaminan sosial diharapkan dapat mendorong keluarga nelayan untuk berpartisipasi dalam program BPJS Ketenagakerjaan sebagai bentuk mitigasi terhadap risiko pekerjaan. Kegiatan diikuti oleh **lima orang peserta** yang hadir secara sukarela melalui koordinasi dengan kelompok nelayan setempat.

2.3 Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pengabdian dilaksanakan menggunakan metode **sosialisasi partisipatif**, yaitu penyampaian informasi yang dipadukan dengan komunikasi dua arah sehingga peserta dapat menyampaikan pengalaman, pendapat, maupun pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang diberikan. Pendekatan ini dipilih agar proses pembelajaran berlangsung lebih interaktif dan materi yang disampaikan dapat dikaitkan dengan kondisi nyata yang dihadapi keluarga nelayan.

Materi sosialisasi meliputi beberapa pokok bahasan sebagai berikut.

1. **Karakteristik risiko pekerjaan nelayan**, termasuk berbagai jenis kecelakaan kerja yang umum terjadi selama aktivitas penangkapan ikan serta dampaknya terhadap kondisi sosial ekonomi keluarga.
2. **Pentingnya perlindungan sosial bagi nelayan sektor informal**, sebagai upaya mengurangi kerentanan ekonomi rumah tangga apabila terjadi kecelakaan kerja, cacat tetap, maupun kematian.
3. **Program BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja Bukan Penerima Upah (BPU)**, yang mencakup persyaratan kepesertaan, besaran iuran, manfaat program, serta mekanisme pendaftaran.

4. Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), termasuk cakupan perlindungan, jenis santunan yang diberikan, dan prosedur pengajuan klaim.

Materi disampaikan menggunakan media presentasi yang disertai contoh kasus dan ilustrasi kejadian kecelakaan kerja yang umum dialami nelayan. Penyampaian materi dilakukan secara komunikatif dengan mendorong peserta untuk berbagi pengalaman sehingga materi lebih mudah dipahami dan relevan dengan kondisi masyarakat.

2.4 Diskusi Interaktif

Setelah penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Pada sesi ini peserta diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan maupun menyampaikan pengalaman yang berkaitan dengan risiko pekerjaan nelayan dan perlindungan sosial.

Diskusi berlangsung secara aktif dan menghasilkan berbagai tanggapan mengenai kekhawatiran istri nelayan terhadap keselamatan suami selama bekerja di laut, pengalaman menghadapi kecelakaan kerja, serta kebutuhan akan sistem perlindungan sosial yang mampu memberikan jaminan ekonomi bagi keluarga apabila terjadi risiko pekerjaan.

Selain menjadi media klarifikasi terhadap materi yang disampaikan, diskusi ini juga menjadi sarana untuk memahami persepsi peserta mengenai pentingnya jaminan sosial bagi keluarga nelayan.

2.5 Evaluasi Kegiatan

Evaluasi dilakukan secara deskriptif melalui observasi terhadap partisipasi peserta selama kegiatan berlangsung serta melalui diskusi pada akhir sesi untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan.

Keberhasilan kegiatan diukur berdasarkan beberapa indikator, yaitu:

1. Tingginya partisipasi peserta selama kegiatan berlangsung.
2. Meningkatnya pemahaman peserta mengenai risiko pekerjaan nelayan.
3. Meningkatnya pengetahuan mengenai manfaat BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja sektor informal.
4. Meningkatnya pemahaman mengenai prosedur kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kategori BPU.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di Desa Bugis, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima dengan sasaran utama istri nelayan **pole and line**. Kegiatan diawali dengan penyampaian materi mengenai karakteristik pekerjaan nelayan yang memiliki tingkat risiko kecelakaan kerja lebih tinggi dibandingkan sebagian besar pekerjaan di darat. Selanjutnya, peserta diberikan informasi mengenai pentingnya perlindungan sosial bagi pekerja sektor informal, khususnya melalui program BPJS Ketenagakerjaan kategori Bukan Penerima Upah (BPU).

Materi sosialisasi difokuskan pada manfaat program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), besaran iuran, persyaratan kepesertaan, serta mekanisme pendaftaran dan pengajuan klaim. Penyampaian materi dilakukan secara interaktif menggunakan presentasi dan diskusi sehingga peserta dapat mengaitkan informasi yang diperoleh dengan pengalaman mereka sehari-hari.

Selama kegiatan berlangsung, peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi. Hal ini ditunjukkan oleh aktifnya peserta dalam menyampaikan pertanyaan, berbagi pengalaman, serta mendiskusikan berbagai kejadian kecelakaan kerja yang pernah dialami oleh anggota keluarga maupun nelayan lain di lingkungan mereka. Tingginya partisipasi peserta menunjukkan bahwa

isu keselamatan kerja dan perlindungan sosial merupakan kebutuhan nyata bagi masyarakat nelayan. Kegiatan sosialisasi tidak hanya berfungsi sebagai media penyampaian informasi, tetapi juga menjadi ruang dialog antara fasilitator dan peserta mengenai tantangan yang dihadapi keluarga nelayan dalam mengelola risiko pekerjaan. Pendekatan partisipatif seperti ini dinilai mampu meningkatkan efektivitas penyampaian informasi karena peserta dapat menghubungkan materi yang diberikan dengan kondisi yang mereka alami secara langsung. Pendekatan pembelajaran yang melibatkan pengalaman peserta terbukti lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat dibandingkan metode ceramah satu arah (FAO, 2024; ILO, 2025).

Persepsi Istri Nelayan terhadap Risiko Pekerjaan Suami

Meskipun tujuan utama kegiatan adalah sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan, diskusi yang berlangsung selama kegiatan memberikan gambaran mengenai persepsi istri nelayan terhadap risiko pekerjaan yang dihadapi suami mereka. Hampir seluruh peserta menyatakan bahwa pekerjaan sebagai nelayan merupakan pekerjaan yang penuh ketidakpastian dan memiliki risiko kecelakaan yang tinggi.

Risiko yang paling banyak dikhawatirkan adalah **cuaca buruk** ketika suami sedang melaut. Peserta menjelaskan bahwa perubahan kondisi cuaca yang cepat sering kali menimbulkan kekhawatiran karena komunikasi dengan kapal selama operasi penangkapan masih sangat terbatas. Ketidakpastian mengenai kondisi suami selama berada di laut menyebabkan keluarga baru merasa tenang setelah kapal kembali ke pelabuhan.



Gambar 1. Diskusi persepsi istri nelayan terhadap resiko pekerjaan suami

Selain faktor cuaca, peserta juga mengidentifikasi berbagai potensi kecelakaan kerja yang sering terjadi selama operasi penangkapan, seperti terpeleset di geladak kapal yang basah, tertusuk mata pancing, tertimpa ikan tuna berukuran besar ketika proses hauling, terjatuh ke laut, serta kecelakaan di ruang mesin. Menurut peserta, sebagian besar kecelakaan tersebut memang tidak selalu mengakibatkan kematian, tetapi sering menyebabkan luka yang membutuhkan waktu lama untuk pulih sehingga nelayan tidak dapat bekerja dalam beberapa waktu. Kondisi tersebut berdampak langsung pada pendapatan rumah tangga karena sebagian besar keluarga nelayan bergantung pada penghasilan harian atau sistem bagi hasil.

Temuan ini menunjukkan bahwa istri nelayan memiliki pemahaman yang baik mengenai risiko pekerjaan suami berdasarkan pengalaman hidup sehari-hari. Persepsi tersebut tidak hanya terbentuk dari informasi yang diterima, tetapi juga dari pengalaman menyaksikan atau mendengar kejadian kecelakaan yang dialami oleh anggota keluarga maupun nelayan lain di komunitas mereka. Menurut teori persepsi risiko, pengalaman langsung merupakan salah satu faktor utama yang memengaruhi cara individu menilai tingkat bahaya suatu pekerjaan.

Semakin sering seseorang berinteraksi dengan suatu risiko, semakin tinggi pula persepsi terhadap kemungkinan dan dampak risiko tersebut (Slovic, 1987).

Selain risiko keselamatan, peserta juga lebih banyak menyoroti konsekuensi ekonomi yang timbul apabila nelayan mengalami kecelakaan. Mereka menyampaikan bahwa kehilangan kemampuan bekerja, meskipun hanya sementara, dapat menyebabkan keluarga mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kondisi ini mencerminkan bahwa kerentanan rumah tangga nelayan tidak hanya berasal dari tingginya risiko pekerjaan, tetapi juga dari ketergantungan terhadap satu sumber pendapatan utama. Temuan ini sejalan dengan laporan ILO (2025) yang menyatakan bahwa pekerja perikanan skala kecil di Indonesia masih menghadapi tingkat kerentanan ekonomi yang tinggi akibat minimnya akses terhadap sistem perlindungan sosial.

Peningkatan Pemahaman mengenai BPJS Ketenagakerjaan

Diskusi selama kegiatan menunjukkan bahwa sebagian besar peserta belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai program BPJS Ketenagakerjaan sebelum mengikuti sosialisasi. Meskipun beberapa peserta pernah mendengar mengenai BPJS Ketenagakerjaan, pengetahuan mereka masih terbatas pada anggapan bahwa program tersebut hanya diperuntukkan bagi pekerja formal atau pegawai perusahaan.



Gambar 2. Peningkatan pemahaman istri nelayan terhadap BJS Ketenagakerjaan

Peserta juga belum memahami bahwa nelayan sektor informal dapat menjadi peserta melalui skema **Bukan Penerima Upah (BPU)** dengan besaran iuran yang relatif terjangkau. Informasi mengenai manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), prosedur pendaftaran, serta mekanisme klaim merupakan materi yang paling banyak menarik perhatian peserta selama kegiatan berlangsung. Salah satu topik yang paling sering didiskusikan adalah bentuk perlindungan yang diberikan apabila nelayan mengalami kecelakaan saat bekerja di laut. Peserta menyampaikan berbagai pertanyaan mengenai cakupan manfaat program, termasuk biaya pengobatan, santunan apabila terjadi cacat tetap, serta santunan bagi ahli waris apabila nelayan meninggal dunia akibat kecelakaan kerja maupun penyebab lain yang termasuk dalam ketentuan program. Antusiasme tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan informasi mengenai perlindungan sosial masih cukup tinggi di kalangan keluarga nelayan.

Kegiatan sosialisasi juga berhasil mengubah persepsi sebagian peserta terhadap BPJS Ketenagakerjaan. Sebelum kegiatan, iuran bulanan dipandang sebagai tambahan pengeluaran rumah tangga. Namun, setelah memperoleh penjelasan mengenai manfaat program, peserta mulai memandang kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebagai bentuk investasi untuk

mengurangi risiko ekonomi keluarga. Perubahan cara pandang ini merupakan salah satu indikator penting keberhasilan kegiatan karena peningkatan literasi keuangan dan perlindungan sosial sering kali menjadi langkah awal sebelum masyarakat memutuskan untuk berpartisipasi dalam suatu program jaminan sosial (ILO, 2025).

Dalam konteks rumah tangga nelayan, istri memiliki peran yang sangat strategis dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan keuangan keluarga. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman istri mengenai manfaat jaminan sosial berpotensi meningkatkan partisipasi keluarga nelayan dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Temuan ini sejalan dengan berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa perempuan berperan penting dalam membangun ketahanan rumah tangga melalui pengelolaan sumber daya ekonomi dan pengambilan keputusan terkait strategi mitigasi risiko (FAO, 2024).

Implikasi terhadap Ketahanan Rumah Tangga Nelayan

Kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa peningkatan literasi mengenai perlindungan sosial tidak hanya memberikan tambahan pengetahuan kepada peserta, tetapi juga berpotensi memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga nelayan. Dalam kondisi pekerjaan yang memiliki tingkat risiko tinggi seperti perikanan tangkap, keberadaan jaminan sosial menjadi instrumen penting untuk mengurangi kerentanan keluarga terhadap guncangan ekonomi akibat kecelakaan kerja maupun kematian pencari nafkah utama.

Pendekatan sosialisasi yang menyasar istri nelayan memiliki nilai strategis karena perempuan merupakan aktor utama dalam pengelolaan keuangan rumah tangga. Pemahaman yang lebih baik mengenai manfaat perlindungan sosial diharapkan dapat meningkatkan kesadaran keluarga untuk mengalokasikan sebagian kecil pendapatan sebagai iuran jaminan sosial, sehingga ketika risiko pekerjaan terjadi, keluarga memiliki perlindungan finansial yang lebih baik.

Meskipun demikian, peningkatan pengetahuan belum tentu secara langsung diikuti oleh peningkatan kepesertaan. Keputusan untuk mendaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan juga dipengaruhi oleh kemampuan ekonomi rumah tangga, kontinuitas pendapatan nelayan, kemudahan akses pendaftaran, serta kepercayaan masyarakat terhadap program jaminan sosial. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi seperti ini perlu diikuti dengan pendampingan pendaftaran dan kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan maupun pemerintah daerah agar informasi yang telah diperoleh peserta dapat diwujudkan menjadi kepesertaan aktif.

Secara keseluruhan, hasil kegiatan menunjukkan bahwa sosialisasi yang melibatkan istri nelayan merupakan pendekatan yang potensial untuk meningkatkan literasi perlindungan sosial di komunitas perikanan. Selain memberikan pemahaman mengenai manfaat BPJS Ketenagakerjaan, kegiatan ini juga mendorong terbentuknya kesadaran bahwa perlindungan sosial merupakan bagian penting dari strategi membangun ketahanan rumah tangga nelayan dalam menghadapi risiko pekerjaan yang tidak dapat diprediksi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan bagi istri nelayan *pole and line* di Desa Bugis, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, berhasil meningkatkan pemahaman peserta mengenai pentingnya perlindungan sosial bagi keluarga nelayan. Diskusi selama kegiatan menunjukkan bahwa istri nelayan telah memiliki kesadaran yang tinggi terhadap berbagai risiko pekerjaan yang dihadapi suami mereka, seperti cuaca buruk, kecelakaan saat proses penangkapan, terjatuh ke laut, maupun cedera akibat penggunaan alat tangkap. Namun demikian, pengetahuan mengenai mekanisme perlindungan sosial yang tersedia bagi pekerja sektor informal, khususnya melalui program BPJS Ketenagakerjaan kategori Bukan Penerima Upah (BPU), masih relatif terbatas sebelum kegiatan dilaksanakan.

Melalui penyampaian materi dan diskusi interaktif, peserta memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai manfaat program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), persyaratan kepesertaan, besaran iuran, serta prosedur pendaftaran dan pengajuan klaim. Perubahan pemahaman tersebut menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi mampu meningkatkan literasi perlindungan sosial pada keluarga nelayan, sekaligus mengubah persepsi bahwa kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bukan sekadar tambahan beban pengeluaran, melainkan merupakan bentuk investasi untuk melindungi keberlangsungan ekonomi rumah tangga ketika terjadi risiko pekerjaan.

Kegiatan ini juga menegaskan bahwa istri nelayan memiliki peran strategis dalam pengambilan keputusan ekonomi rumah tangga, termasuk dalam mendorong kepesertaan program jaminan sosial. Oleh karena itu, pelibatan perempuan dalam program-program edukasi mengenai keselamatan kerja dan perlindungan sosial perlu menjadi bagian dari strategi pemberdayaan masyarakat pesisir.

Ke depan, kegiatan sosialisasi serupa perlu diintegrasikan dengan layanan pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan secara langsung melalui kolaborasi antara BPJS Ketenagakerjaan, pemerintah daerah, pemerintah desa, kelompok nelayan, serta organisasi masyarakat pesisir. Pendekatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan angka kepesertaan nelayan sektor informal sehingga mampu memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi rumah tangga nelayan dalam menghadapi berbagai risiko pekerjaan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih diberikan kepada masyarakat kelompok istri nelayan di Desa Bugis Kecamatan Sape, Kabupaten Bima yang sudah mendukung dan mengikuti kegiatan sosialisasi jaminan sosial ketenagakerjaan bagi istri nelayan pole and line sebagai upaya meningkatkan ketahanan sosial rumah tangga nelayan. Sehingga kegiatan pengabdian dapat berjalan dengan lancar dan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik Indonesia 2024*. Jakarta: BPS.
- BPJS Ketenagakerjaan. (2023). *Pedoman Kepesertaan Program Bukan Penerima Upah (BPU)*. Jakarta: BPJS Ketenagakerjaan.
- BPJS Ketenagakerjaan. (2024). *Laporan Tahunan BPJS Ketenagakerjaan 2024*. Jakarta: BPJS Ketenagakerjaan.
- Food and Agriculture Organization. (2015). *Voluntary Guidelines for Securing Sustainable Small-Scale Fisheries in the Context of Food Security and Poverty Eradication*. Rome: FAO.
- Food and Agriculture Organization. (2022). *The State of World Fisheries and Aquaculture 2022: Towards Blue Transformation*. Rome: FAO.
- Food and Agriculture Organization. (2024). *The State of World Fisheries and Aquaculture 2024: Blue Transformation in Action*. Rome: FAO.
- International Labour Organization. (2007). *Work in Fishing Convention, 2007 (No. 188)*. Geneva: ILO.
- International Labour Organization. (2021). *World Employment and Social Outlook 2021: The Role of Digital Labour Platforms in Transforming the World of Work*. Geneva: ILO.
- International Labour Organization. (2024). *World Social Protection Report 2024–2026: Universal Social Protection for Climate Action and a Just Transition*. Geneva: ILO.
- International Labour Organization. (2025). *Understanding Working Conditions of Fishers in Indonesia*. Geneva: ILO.

-
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2023). *Kelautan dan Perikanan dalam Angka 2023*. Jakarta: KKP.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2024). *Kelautan dan Perikanan dalam Angka 2024*. Jakarta: KKP.
- Slovic, Paul. (1987). *Perception of Risk*. *Science*, 236(4799), 280–285.
- Sen, Amartya. (1999). *Development as Freedom*. Oxford University Press.
- Scoones, Ian. (1998). *Sustainable Rural Livelihoods: A Framework for Analysis*. IDS Working Paper No. 72.
- United Nations. (2015). *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*.
- World Health Organization. (2022). *World Report on Health Equity for Persons with Disabilities*. Geneva: WHO.